

Dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Pandeglang - Banten

Desmintari¹⁾; Lina Aryani²⁾

¹⁾ desmintari@upnvi.ac.id, Fakultas Ekonomi&Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²⁾ lina.aryani59@gmail.com, Fakultas Ekonomi&Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Article Info:

Abstract

Keywords:

Original Local Government Revenue;
Human Development Index; Poverty;
Ordinary Least Square.

Article History:

Received : May, 09 2021
Revised :
Accepted :

Article Doi:

<http://dx.doi.org/10.22441/jies.2021>

Pandeglang City is a buffer for the Special Capital Region of Jakarta, where most of the population of Pandeglang Regency works in Jakarta and settlements in Pandeglang Regency, who go to Jakarta every day to work and mostly live on fishing / fishing and farming in terms of welfare. so poverty in Pandeglang Regency is still relatively high. Regional Original Income, the Human Development Index also affects the life of the community in Pandeglang district classified as prosperous or not. This research was conducted in order to analyze the Regional Revenue and Human Development Index of poverty in the Pandeglang Regency in 2010-2017 with the aim of analyzing the influence of regional income and human development indices on the number of poor people in Pandeglang Regency by analyzing how much progress and increase development in Pandeglang district has always been influenced by its citizens and local original income. By using the analytical tool used is the OLS analysis with the results of Local Revenue significantly influence Poverty Rate. And the independent variable Human Development Index Value significantly influence the Poverty Rate

Abstrak

Kota Pandeglang adalah penyangga Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sebagian besar penduduk Kabupaten Pandeglang bekerja di Jakarta dan tempat tinggal di Kabupaten Pandeglang, yang setiap hari ke Jakarta untuk bekerja dan sebagian besar hidup dari menangkap ikan / nelayan dan bertani yang dilihat dari segi kesejahteraan sangatlah kurang sehingga kemiskinan di Kabupaten Pandeglang masih tergolong tinggi. Pendapatan Asli daerah, Indeks Pembangunan Manusia juga berdampak ke kehidupan masyarakat di kabupaten Pandeglang tergolong sejahtera atau tidak. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis Pendapatan Asli Daerah dan Indeks Pembangunan manusia terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang tahun 2010 -2017 dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh variabel pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang dengan menganalisis seberapa besar kemajuan dan peningkatan pembangunan di kabupaten Pandeglang selalu dipengaruhi oleh warganya dan pendapatan asli daerah. Dengan menggunakan alat analisis yang digunakan adalah analisis OLS dengan hasil Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Angka Kemiskinan dan variabel bebas Nilai Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Angka Kemiskinan.

Kata Kunci: PAD; IPM; Kemiskinan; OLS

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan musuh dari tujuan utama otonomi daerah. Dimana, pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal ini telah membawa konsekuensi pada pemerintah daerah dalam mengatur serta mengurus kepentingan daerahnya sendiri menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi

masyarakat dan tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu mendukung peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga pada akhirnya kemiskinan bisa terentaskan dan mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip otonomi daerah harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. Artinya, pemerintah daerah diberikan kewenangan secara luas, nyata, bertanggung jawab dan proporsional dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan esensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini merupakan wujud dari kewenangan dalam bidang keuangan daerah. Menurut Suparmoko (2002), dengan semakin mendekatkannya pemerintah kepada masyarakat diharapkan pelayanan publik dapat diwujudkan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan di sektor ekonomi merupakan hal yang paling esensi dalam mengembangkan potensi dan membangun daerah. Hal ini, membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat dalam menunjang program pembangunan di bidang ekonomi. Membangun perekonomian berarti menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan.

Masalah di negara berkembang adalah terfokus pada dilema antara pertumbuhan dan pendapatan (Arifin, 2009). Menurunnya jumlah penduduk miskin adalah indikator keberhasilan pembangunan, instrumen pembangunan adalah sangat efektivitas untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Kesimpulan dari hal ini adalah kriteria utama untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi adalah dengan mengurangi jumlah penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya yang rendah akan menyebabkan rendahnya produktivitas dan berakibat pada berkurangnya penghasilan sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin, kualitas sumber daya dapat kita lihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui Dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Pandeglang..
3. Untuk mengetahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Pandeglang..
4. Untuk memperkuat dan mengisi kajian salah satu konsentrasi Ekonomi Pembangunan pada Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan menganalisis kondisi Makro di Kabupaten Pandeglang.

Kegunaan Penelitian

1. Bagi Kabupaten Pandeglang
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah Kabupaten Pandeglang
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi yang dapat dijadikan bahan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

Tinjauan Pustaka

Peningkatan produktifitas suatu daerah secara tidak langsung akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut juga akan menaikkan kapasitas penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat (Todaro, 2011).

Desentralisasi fiskal memberikan banyak kewenangan kepada daerah guna menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah. Adapun tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Besar kecilnya pendapatan asli daerah akan berdampak pada perannya perusahaan daerah yang sangat kecil, tingginya derajat sentralisasi dalam perpajakan dan lain lain (Sudarti, 1998).

Pendapatan Asli Daerah tidak terlepas dengan adanya modal dan sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan suatu modal yang dapat disejajarkan dengan modal fisik dalam menciptakan suatu output, Menurut Suparmoko (2011) Sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari:

1. PAD ^[L]_[SEP]
2. Dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU, DAK) ^[L]_[SEP]
3. Pinjaman Daerah ^[L]_[SEP]
4. Dana Dekonsentrasi ^[L]_[SEP]
5. Dana Tugas Pembantuan ^[L]_[SEP]

Sumber pembangunan manusia adalah di bidang pendidikan dan kesehatan. Investasi pendidikan dan kesehatan menyatu dengan human capital yang berfokus pada kemampuan tidak langsung untuk meningkatkan utilitas dengan meningkatkan pendapatan. Keuntungan pendapatan dari pendidikan dan kesehatan harus dibandingkan dengan total biaya untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan sebagai investasi (Todaro, 2011).

Modal pembangunan ekonomi yang penting selain Pendapatan Asli Daerah dan modal manusia adalah sumber daya manusia. Keadaan wilayah yang berbeda-beda mendorong setiap daerah untuk menangkap potensi yang dimiliki, salah satunya potensi sumber daya manusia. Pembangunan daerah yang terus berkembang cepat didorong dengan adanya kerjasama dari masyarakat, adapun kerjasama tersebut dapat memberikan rasa kepemilikan terhadap daerahnya.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas disamping terpenuhinya kuantitas permintaan tenaga kerja. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dengan indikator keberhasilan pembangunan yang salah satunya disebut dengan indeks pembangunan manusia. Semakin tinggi angka indeks pembangunan manusia berarti semakin baik, sehingga dapat dikatakan pembangunan semakin berhasil (Susilowati & Suliswanto, 2015). Suatu daerah dikatakan maju apabila ditunjang dari pengetahuan masyarakat yang tinggi, adanya sumber daya alam yang cukup memadai yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mempunyai potensi besar guna tercapainya kemajuan pembangunan daerah. Salah satu indikasinya adalah banyaknya tenaga kerja dan sedikit pengangguran (Arifin, 2009, Kusuma, 2017).

Beberapa hasil kajian dan penelitian telah diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat. Asian Development Bank (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dinamis telah banyak mengurangi kemiskinan. Jumlah penduduk yang berjuang untuk hidup dengan \$ 1 atau kurang per hari telah turun dari 900 juta tahun 1990 menjadi 600 juta sekarang. Ini dapat diartikan sebagai peningkatan pendidikan, kesehatan yang lebih baik, usia yang lebih panjang, dan kesempatan yang lebih besar.

Angka Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah accidental poverty, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Sedangkan menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah^[1] (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang Sah. Pendapatan asli daerah dalam laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Depok.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam UNDP (United Nations Development Programme), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“a process of enlarging people’s choices”). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100. Pengertian IPM yang dikeluarkan oleh UNDP yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia (Suliswanto, 2010).

IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli / paritas daya beli (PPP) masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (Suliswanto, 2010).

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, Indeks Pembangunan Manusia, karena dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, dengan demikian menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak (Darsyah & Warsono, 2013).

Pembentukan modal manusia adalah suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif. Lembaga United Nations Development Programme (UNDP) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut Human Development Indeks (HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan SDM yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan SDM secara sempurna. Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut (Darsyah & Warsono, 2013):

- a. Longevity, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau life expectancy of birth dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau infant mortality rate.
- b. Educational Achievement, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (adult literacy rate) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (the mean years of schooling).
- c. Access to resource, dapat diukur secara makro melalui PDB rill perkapita dengan terminologi purchasing power parity dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Penelitian oleh (Whisnu Adhi Saputra, 2011) dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh

positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, dan Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh suatu lembaga kemudian di publikasikan ke masyarakat luas. Data yang diambil dari penelitian ini adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Pusat dan Kabupaten Pandeglang dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan jenis data time series. Data tersebut berupa data historical angka kemiskinan Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2017, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2017 yang berupa realisasi Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Pembangunan Manusia bersumber dari:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang^[1]
2. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Kabupaten Pandeglang
3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pandeglang.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel atau dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variable terikat kemiskinan dan variabel bebas PAD, IPM merupakan variable bebas.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Kemiskinan diukur dari jumlah penduduk miskin. Jumlah Penduduk Miskin adalah jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu yang dikategorikan penduduk miskin berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Penduduk miskin menurut definisi dan data Badan Pusat Statistik, dimana definisinya adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Dimana, Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Pendapatan Asli Daerah^[2] PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang Sah. Pendapatan asli daerah dalam laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2005-2017.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu:

- Indeks Harapan Hidup^[3]

- Indeks Pendidikan^{[L][SEP]}
 - Indeks Standart Hidup Layak
- Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (X1 + X2 + X3)$$

Sumber:(Bappenas, 2018)

Di mana :

X1 = Indeks Harapan Hidup^{[L][SEP]}

X2 = Indeks Pendidikan^{[L][SEP]}

X3 = Indeks Standart Hidup Layak^{[L][SEP]}

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksinya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100.

Beberapa hasil kajian dan penelitian telah diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat.

Data Penelitian Kabupaten Pandeglang dengan data BPS Kabupaten Pandeglang tahun 2010-2017 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana Y adalah angka kemiskinan,

β_0 adalah konstanta/intersep,

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ adalah koefisien regresi parsial,

X1 adalah pendapatan asli daerah (PAD)

X2 adalah indeks pembangunan manusia (IPM)

Analisis data dilakukan dengan OLS atau regresi , Uji statistik antara lain yaitu Uji t , Uji f dan Uji R-Square untuk mengetahui variabel bebas secara simultan maupun secara parsial dan pengujian tersebut menggunakan software EViews 9.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang ada di Kabupaten Pandeglang yang meliputi angka kemiskinan, pendapatan asli daerah (PAD), indeks pembangunan manusia (IPM) dari tahun 2005 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kemiskinan, PAD, IPM

Tahun	PVP	PAD	IPM
2005	153.73	12.71	66.80

2006	177.89	19.26	66.90
2007	176.81	41.59	67.39
2008	165.24	33.48	67.75
2009	138.00	31.92	67.99
2010	127.80	31.86	59.08
2011	117.64	56.19	59.92
2012	109.10	54.05	60.48
2013	121.10	80.58	61.35
2014	113.14	92.33	62.06
2015	124.42	129.95	62.72
2016	115.90	198.75	63.40
2017	117.31	194.12	63.82

Sumber: BPS dan Kabupaten Pandeglang dalam angka

Adapun Spesifikasi Model Penelitian

$$PVP = \beta_0 + \beta_1 PAD + \beta_2 IPM$$

Dimana PVP adalah angka kemiskinan (dalam persen)

β_0 adalah konstanta/intersep,

β_1, β_2 , adalah koefisien regresi parsial,

PAD adalah pendapatan asli daerah (dalam milyar rupiah)

IPM adalah indeks pembangunan manusia.

Model di atas akan diestimasi parameter koefisien regresi dan konstantanya, yaitu nilai $\beta_0, \beta_1, \beta_2$. Data disusun dalam format seperti di bawah ini dan persamaan model diestimasi menggunakan *software EViews 9*.

Pengujian Asumsi Klasik

a) Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada tabel kolom Centered VIF. Nilai VIF untuk variabel PAD dan IPM sama-sama 1,0727. Karena nilai VIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau bahkan 5 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada kedua variabel bebas tersebut.

b) Autokorelasi

Jumlah variabel bebas : $k = 2$

Jumlah sampel : $n = 13$

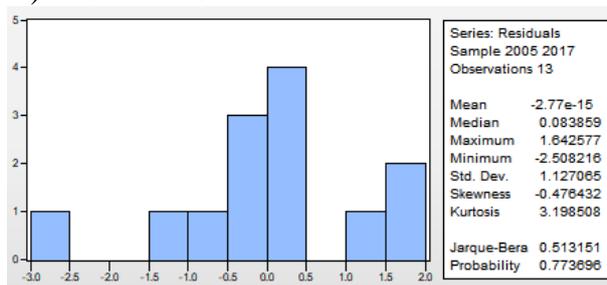
Tabel Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai $dL = 0,861$ dan nilai $dU = 1,562$ sehingga dapat ditentukan kriteria terjadi atau tidaknya autokorelasi seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2. Output Durbin-Watson



Nilai DW hitung sebesar 2,382 lebih besar dari 1,562 dan lebih kecil dari 2,438 yang artinya berada pada daerah **tidak ada autokorelasi**. Hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan dua pendekatan memberikan hasil yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier yang diajukan tidak mengandung autokorelasi. Artinya pemenuhan asumsi klasik model regresi linier telah dipenuhi.

c) Normalitas



Gambar 1. Output Uji Normalitas

Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila Prob. JB hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nilai Prob. JB hitung sebesar $0,7737 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah dipenuhi.

d) Linieritas

Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka model regresi memenuhi asumsi linieritas dan sebaliknya, apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat model tidak memenuhi asumsi linieritas. Nilai Prob. F hitung dapat dilihat pada baris F-statistic kolom Probability. Pada kasus ini nilainya 0,9029 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi linieritas.

Tabel 3. Output Uji Linearitas

Ramsey RESET Test
Equation: PERS02PANDEGLANG
Specification: PVP C PAD IPM
Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	0.125527	9	0.9029
F-statistic	0.015757	(1, 9)	0.9029
Likelihood ratio	0.022740	1	0.8801

F-test summary:

	Sum of Sq...	df	Mean Squares
Test SSR	0.026641	1	0.026641
Restricted SSR	15.24331	10	1.524331
Unrestricted SSR	15.21667	9	1.690741

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	-19.48095	10
Unrestricted LogL	-19.46958	9

Unrestricted Test Equation:
Dependent Variable: PVP
Method: Least Squares
Date: 09/16/19 Time: 16:01
Sample: 2005 2017
Included observations: 13

Variable	Coefficien...	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-47.71817	224.6145	-0.212445	0.8365
PAD	-0.034706	0.142034	-0.244346	0.8124
IPM	1.070076	4.472472	0.239258	0.8163
FITTED^2	-0.044866	0.357420	-0.125527	0.9029
R-squared	0.787052	Mean dependent var		11.66615
Adjusted R-squared	0.716070	S.D. dependent var		2.440241
S.E. of regression	1.300285	Akaike info criterion		3.610704
Sum squared resid	15.21667	Schwarz criterion		3.784534
Log likelihood	-19.46958	Hannan-Quinn criter.		3.574974
F-statistic	11.08796	Durbin-Watson stat		2.128565
Prob(F-statistic)	0.002230			

e) Heteroskedastisitas

Nilai Prob. F hitung sebesar 0,1811 lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) sehingga, berdasarkan uji hipotesis, H_0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3. Output Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	2.037183	Prob. F(2,10)	0.1811
Obs*R-squared	3.763350	Prob. Chi-Square(2)	0.1523
Scaled explained SS	3.706007	Prob. Chi-Square(2)	0.1568

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 09/16/19 Time: 16:10
Sample: 2005 2017
Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.697547	4.302025	-0.627041	0.5447
PAD	-0.005069	0.003384	-1.497965	0.1650
IPM	0.060645	0.066191	0.916213	0.3811
R-squared	0.289488	Mean dependent var		0.791891
Adjusted R-squared	0.147386	S.D. dependent var		0.768718
S.E. of regression	0.709812	Akaike info criterion		2.351541
Sum squared resid	5.038332	Schwarz criterion		2.481914
Log likelihood	-12.28502	Hannan-Quinn criter.		2.324744
F-statistic	2.037183	Durbin-Watson stat		2.773105
Prob(F-statistic)	0.181074			

Dari kelima uji asumsi klasik ternyata model yang diestimasi memenuhi semua persyaratan Pengujian Asumsi Klasik.

Uji Kelayakan Model

Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$PVP = \beta_0 + \beta_1 PAD + \beta_2 IPM$$

Hasil estimasi menggunakan EViews 9 menghasilkan perhitungan sebagai berikut:

Dependent Variable : PVP

Method : Least Squares

Sample : 205 2017

Tabel 4. Output Uji Kelayakan Model

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std.Error</i>	<i>t-statistik</i>	<i>Prob.</i>
<i>C</i>	<i>-19.54032</i>	<i>7.482887</i>	<i>-2.611334</i>	<i>0.0260</i>
<i>PAD</i>	<i>-0.016893</i>	<i>0.005886</i>	<i>-2.869859</i>	<i>0.0167</i>
<i>IPM</i>	<i>0.508866</i>	<i>0.115131</i>	<i>4.419879</i>	<i>0.0013</i>
<i>R-Squared</i>	<i>0.786679</i>			
<i>Adjusted R-Squares</i>	<i>0.744015</i>			
<i>F-statistik</i>	<i>18.43891</i>			

Prob 0.000442

a) Uji

Kelayakan Model (Uji F)

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel di atas. Nilai prob. F (Statistic) sebesar 0,000442 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap variabel terikat Angka Kemiskinan dalam Persen (PVP).

b) Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Nilai prob. t hitung dari variabel bebas PAD sebesar 0,0167 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel bebas PAD berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat PVP pada alpha 5% atau dengan kata lain, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Angka Kemiskinan dalam Persen pada taraf keyakinan 95%. Sama halnya dengan pengaruh variabel bebas IPM terhadap variabel terikat PVP, karena nilai prob. t hitung (0,0013) yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas IPM berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat PVP pada alpha 5% atau dengan kata lain, Nilai Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Angka Kemiskinan dalam Persen pada taraf keyakinan 95%.

c) Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R-Square pada tabel di atas besarnya 0,7440 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel PAD dan IPM terhadap variabel PVP sebesar 74,40%. Artinya, Pendapatan Asli Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia memiliki proporsi pengaruh terhadap Angka Kemiskinan dalam Persen sebesar 74,40% sedangkan sisanya 25,60% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi.

Interpretasi Model

$$PVP = -19.54 - 0.0169 PAD + 0.5089 IPM$$

Koefisien regresi PAD bernilai negatif artinya pada saat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) positif maka persentase Angka Kemiskinan dalam Persen (PVP) akan mengalami penurunan. Begitu pula pada saat persentase PAD turun maka persentase angka kemiskinan dalam persen akan naik. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 persen akan menurunkan persentase Angka Kemiskinan dalam Persen sebesar 0,0169 persen dan sebaliknya, penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 persen akan meningkatkan persentase Angka Kemiskinan dalam Persen sebesar 0,0169 persen.

Hal yang bisa disebut bersifat anomali terjadi untuk koefisien IPM. Karena dari hasil estimasi didapatkan koefisien regresi IPM bernilai positif, di mana hal ini bertentangan dengan teori yang ada. Pada saat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat maka Angka Kemiskinan dalam Persen (PVP) akan mengalami peningkatan. Begitu pula pada saat Indeks Pembangunan Manusia menurun maka Angka Kemiskinan dalam Persen juga menurun. Pertumbuhan IPM sebesar 1 persen akan meningkatkan persentase Angka Kemiskinan dalam Persen sebesar 0,5089 persen dan sebaliknya, penurunan IPM sebesar 1 persen akan menurunkan persentase Angka Kemiskinan dalam Persen sebesar 0,5089 persen. Karena ini merupakan anomali, maka perlu penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai input data yang digunakan, untuk mencari tahu penyebab terjadinya anomali tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Angka Kemiskinan. Dan variabel bebas Nilai Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Angka Kemiskinan. Hal yang bisa disebut bersifat anomali terjadi untuk koefisien IPM. Karena dari hasil estimasi didapatkan koefisien regresi IPM bernilai positif, di mana hal ini bertentangan dengan teori yang ada. Pada saat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat maka Angka Kemiskinan dalam Persen (PVP) akan mengalami peningkatan. Begitu pula pada saat Indeks Pembangunan Manusia menurun maka Angka Kemiskinan dalam Persen juga menurun. Pertumbuhan IPM sebesar 1 persen akan meningkatkan persentase Angka Kemiskinan dalam Persen sebesar 0,5089 persen dan sebaliknya, penurunan IPM sebesar 1 persen akan menurunkan persentase Angka Kemiskinan dalam Persen sebesar 0,5089 persen.

Saran

Karena ini merupakan anomali, maka perlu penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai input data yang digunakan, untuk mencari tahu penyebab terjadinya anomali tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfida. (2005). *Potensi Sumber Daya Daerah Dan Kesejahteraan Keluarga*
- Arifin, Z. (2009). *Kesenjangan Dan Konverg Ensi Ekonomi Antar Kabupaten Pada Empat Koridor Di Propinsi Jawa Timur. Humanity, IV, 154–164. Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/viewFile/821/3007>*
- Aris Soelistyo. (2004). *Analisis Flypaper Effect PAD Dan Dau Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014.*
- BPS. (2017). *Kabupaten Pandeglang dalam Angka.*
- Bappenas. (2018). *IPM. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id/id/id>*
- Kaluge, D. (2017). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor.*
- Darsyah & Warsono, 2013. *Pendugaan IPM Pada Area Kecil Di Kota Semarang Dengan Pendekatan Nonparametri.*
- Mudrajad, Kuncoro. 2004. *Otonomi & pembangunan daerah. Jakarta: Erlangga.*
- Kusuma, H. K. (2017). *Prosiding Tata Kelola Organisasi dan Ekonomi Pembangunan. Research Report.*
- Nurcholis, M. (2014). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. Jurnal Ekonomi Pembangunan.*
- Sri, M., & Suliswanto, W. (2010). *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia, 8, 358.*
- Sudarti. (1998). *Otonomi Daerah dan pola Hubungan Keuangan pusat-daerah. Bestari, Hal 63– 71.*

Suparmoko. (2002). Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Andi.

Todaro. (2011). Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.

Whisnu Adhi Saputra. (2011). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah (Times New Roman 12, Regular, indent hanging 1,27pt, spasi 1).